KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522805
LAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.926 /ITJ.0/KU.520/V/2026 6 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Audited.

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-776 /KPN.1206/2026 tanggal 21 April 2026 tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPATahun 2025 Audited, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Audited.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal
2. Plt. Sekretaris Jenderal
3. Inspektur V
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL KKP

(AUDITED)

TAHUN

2025

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025
AUDITED

UAKPA
INSPEKTORAT JENDERAL

UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 2,3,4
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3520336, Fax (021) 3513206

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Inspektorat Jenderal adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 Audited berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2026
a.n. Inspektur Jenderal
Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina
NIP 196605191993032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB INSPEKTUR JENDERAL KKP	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
A. PENJELASAN UMUM	9
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	18
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	29
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	32
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	35
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	37

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
INSPEKTUR JENDERAL KKP

Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2025
a.n. Inspektur Jenderal
Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina
NIP 196605191993032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Hasil Rekonsiliasi/SHR (sampai dengan Periode 31 Desember 2025)
2. Laporan Keuangan Versi Aplikasi SAKTI Modul GLP
3. Laporan Keuangan Versi MonSAKTI
4. Laporan Pertanggungjawaban BP dan Rekening Koran (sampai dengan Periode 31 Desember 2025)
5. Surat Setoran Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan – LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 Audited. Realisasi Pendapatan Negara periode 1 Januari sampai dengan 31 DesemberI Tahun Anggatan 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp70.674.934,00. Realisasi Belanja Negara periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp49.585.196.401,00. atau mencapai 98,87 persen terhadap alokasi anggaran sebesar Rp50.150.274.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.981.777.604,00. yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp34.390.710,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp3.947.386.894,00; Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0,00; Kewajiban sebesar Rp0,00 dan Ekuitas Rp3.981.777.604,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp51.763.985.098,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp51.763.985.098,00). Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional Rp68.331.634,00 dan Pos-Pos Luar Biasa Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp51.695.653.464,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp6.172.329.601,00,- dikurangi dengan Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp51.695.653.464,00). Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas Rp0,00. Kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp49.505.101.467,00. Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar (Rp2.190.551.997,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.981.777.604,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Audited disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 Audited disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

INSPEKTORAT JENDERAL KKP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 2024
AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025			2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0.**	**0.**	**0**	**0.**	**0.**	**0.**
I. Pendapatan Perpajakan	**0.**	**0.**	**0**	**0.**	**0.**	**0.**
1. Pajak Dalam Negeri	0.	0.	0	0.	0.	0.
2. Pajak Perdagangan Internasional	0.	0.	0	0.	0.	0.
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0.**	**70.674.934**	**0**	**0.**	**23.878.250**	**0.**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0	0.	0.	0.
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0.	0.	0	0.	0.	0.
3. Pendapatan BLU	0.	0.	0	0.	0.	0.
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0.	70.674.934	0	0.	23.878.250	0.
III. Pendapatan Hibah	**0.**	**0.**	**0**	**0.**	**0.**	**0.**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	**0.**	**70.674.934**	**0**	**0.**	**23.878.250**	**0.**
B. Belanja Negara	**0.**	**0.**	**0**	**0.**	**0.**	**0.**
I. Belanja Pemerintah Pusat	**50.150.274.000.**	**49,585,196,401.**	**98,87**	**86.789.911.000.**	**84,427,641,894.**	**97,28**
1. Belanja Pegawai	39,229,470,000.	38,952,922,377.	99,30	36,583,468,000.	36,574,103,727.	99,97
2. Belanja Barang	10,920,802,000.	10,632,274,024.	97,36	47,498,733,000.	45,145,930,992.	95,05
3. Belanja Modal	2,000.	0.	0	2,707,710,000.	2,707,607,175.	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0.	0.	0	0.	0.	0.
5. Belanja Subsidi	0.	0.	0	0.	0.	0.
6. Belanja Hibah	0.	0.	0	0.	0.	0.
7. Belanja Bantuan Sosial	0.	0.	0	0.	0.	0.
8. Belanja Lain-lain	0.	0.	0	0.	0.	0.
Jumlah Belanja Negara	**50.150.274.000.**	**49,585,196,401.**	**98,87**	**86.789.911.000..**	**84,427,641,894.**	**97,28**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

INSPEKTORAT JENDERAL KKP
NERACA
PER 31 Desember 2025dan 2024
AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0.	0.
Kas Lainnya dan Setara Kas	0.	0.
Piutang Bukan Pajak	0.	0.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0.	0.
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0.	0.
Persediaan	34,390,710.	91,253,504.
JUMLAH ASET LANCAR	**34,390,710.**	**91,253,504.**
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	21,595,385,277.	21,614,225,277.
AKUMULASI PENYUSUTAN	(17,647,998,383.)	(15,522,406,986.)
JUMLAH ASET TETAP	**3,947,386,894.**	**6,091,818,291.**
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	596,070,800.	596,070,800.
Aset Lain-lain	0.	1.896,711,324
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(596,070,800)	(2.490,438,824)
JUMLAH ASET LAINNYA	**0.**	**2,343,300.**
JUMLAH ASET	**3,981,777,604.**	**6,185,415,095.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Pada Pihak Ketiga	0.	13,085,494.
Utang Yang Belum Ditagihkan	0.	0.
Uang muka dari KPPN	0.	0.
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**0.**	**13,085,494.**
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**0.**	**13,085,494.**
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	3,981,777,604.	6,172,329,601.
JUMLAH EKUITAS	**3,981,777,604.**	**6,172,329,601.**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3,981,777,604.**	**6,185,415,095**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

INSPEKTORAT JENDERAL KKP
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 2024
AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan	0.	0.	0.	0.
BEBAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Beban Pegawai	38,939,836,883.	36,587,189,221.	2,352,647,662.	6.43
Beban Persediaan	93,458,747.	273,243,522.	(179,784,775.)	(65.797)
Beban Barang dan Jasa	3,548,919,778.	7,259,223,722.	(3,710,303,944.)	(51.112)
Beban Pemeliharaan	639,786,947.	1.168,104,336.	(528,317,389.)	(45.229)
Beban Perjalanan Dinas	6,406,971,346.	36,457,547,036.	(30,050,575.690.)	(82.426)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0.	0.	0.	0.
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,135,011,397.	2,290,101,538.	(155,090,141.)	(6.772)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.	0.	0.	0.
Beban Transfer	0.	0.	0.	0.
Beban Lain-Lain	0.	0.	0.	0.
JUMLAH BEBAN	**51,763,985,098.**	**84,035,409,375.**	**(32,271,424,277.)**	**(38.402)**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**(51,763,985,098.)**	**(84,035,409,375.)**	**32,271,424,277.**	**(38.402)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	63,301,840.	0.	63,301,840.	0.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	65,645,140.	0.	65,645,140..	0.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2,343,300.	0.	2,343,300.	0.
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5,029,794.	0.	5,029,794.	0.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5,029,794.	0.	5,029,794.	0.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**68,331,634.**	**0.**	**68,331,634.**	**0.**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(51,695,653,464.)**	**(84,022,323,881.)**	**32,339,755,911.**	**(38.483)**
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
Beban Luar Biasa	0.	0.	0.	0.
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
SURPLUS/DEFISIT - LO	**(51,695,653,464.)**	**(84,022,323,881.)**	**32,339,755,911.**	**(38.483)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

INSPEKTORAT JENDERAL KKP
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 2024
AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	**6,172,329,601.**	**5,762,264,041.**	**410,065,560.**	7.12
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(51,695,653,464.)**	**(84,035,409,375.)**	**32,339,755,911.**	(38.48)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0.	119.391.	(119.391.)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0.	0.	0.	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0.	0.	0.	0
LAIN-LAIN	0.	119,391.	(119.391.)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	49,505,101,467.	84,445,355,544.	(34,940,254,077.)	(41,38)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,190,551,997.)	410,065,560.	(2,600,617,557.)	(634,2)
EKUITAS AKHIR	**3,981,777,604.**	**6,172,329,601.**	**(2,190,551,997.)**	(35,49)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.1. Profil Dan Kebijakan Teknis Inspektorat Jenderal KKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern dilingkungan Kementerian Kelautan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP.
b. Pelaksanaan pengawasan intern dilingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kelautan dan Perikanan.
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan dilingkungan KKP.
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Visi :

Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumer Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

Misi :

1. Memberikan pengawasan intern terbaik untuk peningkatan kinerja KKP;
2. Mendorong pengendalian intern yan efektif terhadap sistem dan tata kelola KKP;
3. Mendorong terwujudnya sumber daya manusia aparatur KKP yang berintegritas dan berorientasi pelayanan prima.

Nilai:

Integritas – Profesionalitas – Inovasi

Makna :

Bangga sebagai Mitra Peningkatan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan menuju Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 Audited secara Komprehensif ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal KKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SAKTI modul Aset Tetap dan SAKTI Modul Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Jumlah entitas akuntansi dilingkup Inspektorat Jenderal KKP adalah 1 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA - E1

No	Kode Es I	Uraian	JumlahJenisKewenangan				Jumlah
			KP	KD	DK	TP	
1	02	InspektoratJenderal	1	-	-	-	1
Jumlah			**1**	-	-	-	**1**

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Inspektorat Jenderal KKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat Jenderal KKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 Secara Komperhensif telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal KKP. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal KKP adalah sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pendapatan-LRA

berikut.

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan - LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Beban

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satubulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

AsetTetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dana set tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

kesenian

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah,
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP),
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penggolongan Masa Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang

  a. Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya

  b. Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Inspektorat Jenderal KKP mempuyai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan anggaran sebesar Rp50.150.274.000,00 dengan tabel sebagai berikut:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	39,011,970,000	39,229,470,000
Belanja Barang	39,680,699,000	10,920,802,000
Belanja Modal	3,220,500,000	2,000
Jumlah Belanja	**81,913,169,000**	**50,150,274,000**

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Rp70.674.934,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp70.674.934,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2025		
		Estimasi	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Penjualan PM	-	65,645,140	-
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	5,029,794	-
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-	-
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
	Jumlah	**-**	**70,674,934**	-

Realisasi Pendapatan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 disebabkan terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin serta Pendapatan dari Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perbandingan Realisasi Pendapatan 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi	
	2025	2024
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	65,645,140	-
Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	5,029,794	23,878,250
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-
Jumlah	**70,674,934**	**23,878,250**

Pendapatan dari Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL (425911)

Realisasi Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 pada pos pendapatan dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp5.029.794,00

- Setoran SSBP senilai Rp5.029.794,00 NTPN 0816848VVNU1F225 tanggal 20 Maret 2025, merupakan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL an Kholifah.

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)

Realisasi Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 pada pos pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp65.645.140,00.

- Setoran SSBP senilai Rp65.645.140,00 NTPN 837171JNG8172O09 tanggal 30 Januari 2024, Risalah Lelang nomor 37/07.02/2025-01 tanggal 22 Januari 2025 berupa 1 paket Peralatan dan Mesin inventaris kantor (305 Unit).

B.2.BELANJA

Realisasi Belanja Rp49.585.196.401,00

Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp49.585.196.401,00 atau 98.87% dari anggaran belanja sebesar Rp50.150.274.000,00 dengan Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Kode Jen. Bel.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	39,229,470,000	38,966,668,383	99.33
52	Belanja Barang	10,920,802,000	10,642,948,114	97.46
53	Belanja Modal	2,000	-	0.00
	Total Belanja Bruto	**50,150,274,000**	**49,609,616,497**	**98.92**
	Pengembalian Belanja		24,420,096	0.00
	Total Belanja Neto	**50,150,274,000**	**49,585,196,401**	**98.87**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja (Netto) dapat dilihat dalam grafik ini :

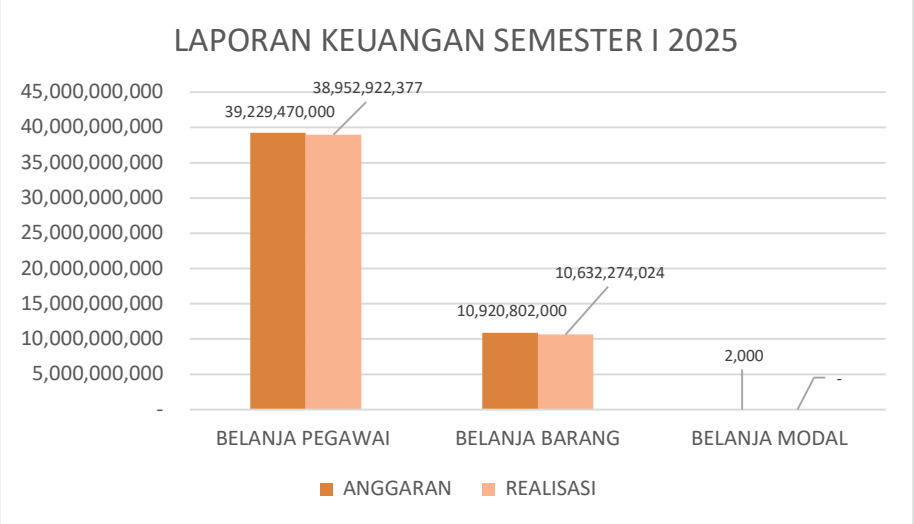

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Berdasarkan Program Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.

PROGRAM	2025		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	50,150,274,000	49,585,196,401	98.87
Total Belanja	**50,150,274,000**	**49,585,196,401**	98.87

Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mencapai presentase sebesar 98,87%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024

Kode Jenis Bel.	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)
		2025	2024	%
51	Belanja Pegawai	38,952,922,377	36,574,103,727	6.50
52	Belanja Barang	10,632,274,024	45,145,930,992	(76.45)
53	Belanja Modal	-	2,707,607,175	(100.00)
	Jumlah	**49,585,196,401**	**84,427,641,894**	**(41.27)**

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp38.952.922.377, 00.

Realisasi Belanja Pegawai pada Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp38.952.922.377,00 dan Rp36.574.103.727,00. Pegawai di Inspektorat Jenderal periode sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah 209 Orang dengan 574 Jiwa sedangkan Pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berjumlah 3 Orang dengan 7 Jiwa. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Periode 31 Desember 2025 sebesar Rp38.952.922.377,00 (99,30%) dan Periode 31 Desember 2024 Rp36.574.103.727,00 (99,97%) . Belanja Pegawai Periode 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan dibandingkan dengan Belanja Pegawai Periode 31 Desember 2024 sebesar 0,67% dikarenakan terdapat kenaikan pada komponen Gaji Pokok PNS serta Tunjangannya dalam hal ini ada penambahan CPNS serta peralihan Jenjang Fungsional dari Muda ke Madya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pengembalian Belanja Pegawai

Pengembalian Belanja Pegawai Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp13.746.006,00 dari belanja Pegawai sebesar Rp38.952.922.377,00 dengan Rincian Pengembalian belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119)

- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 03 tanggal 6 Januari 2025, SP2D nomor 251751303000019 tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp244,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 150 tanggal 21 Maret 2025, SP2D nomor 251751303003375 tanggal 21 Maret 2025 sebesar Rp266,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 171 tanggal 17 April 2025, SP2D nomor 251751303004299 tanggal 17 April 2025 sebesar Rp322,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 246 tanggal 21 Mei 2025, SP2D nomor 251751303006215 tanggal 22 Mei 2025 sebesar Rp198,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 380 tanggal 24 Juli 2025, SP2D nomor 259991330099541 tanggal 24 Juli 2025 sebesar Rp38,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 433 tanggal 21 Agustus 2025, SP2D nomor 259991330158086 tanggal 21 Agustus 2025 sebesar Rp11,00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123)

- Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural an Ivy dari setoran SSBP nomor 7DAA95UFSI98SKCU tanggal 14 Mei 2025 sebesar Rp450.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural an T. Nilwan dari setoran SSBP nomor 8C081522CNMSFKFD tanggal 14 Mei 2025 sebesar Rp860.000,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 247 tanggal 21 Mei 2025, SP2D nomor 251751303006214 tanggal 22 Mei 2025 sebesar Rp1.380.000,00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS (511151)

- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 03 tanggal 6 Januari 2025, SP2D nomor 251751303000019 tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp555.000,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 171 tanggal 17 April 2025, SP2D nomor 251751303004299 tanggal 17 April 2025 sebesar Rp740.000,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 169 tanggal 17 April 2025, SP2D nomor 251751303004300 tanggal 17 April 2025 sebesar Rp1.480.000,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 294 tanggal 5 Juni 2025, SP2D nomor 251751503001004 tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp190.000,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 433 tanggal 21 Agustus 2025, SP2D nomor 259991330158086 tanggal 21 Agustus 2025 sebesar Rp375.000,00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124)

- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS dari setoran SSBP nomor 613800JUTKT40TFC tanggal 30 Juli 2025 sebesar Rp378.000,00.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS dari setoran SSBP nomor 3BA5A6QTCETQRTGB tanggal 30 Juli 2025 sebesar Rp560.000,00.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS dari setoran SSBP nomor 65F781GCDFFGDTH0 tanggal 30 Juli 2025 sebesar Rp160.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS dari setoran SSBP nomor B60857NAS9G78TI4 tanggal 30 Juli 2025 sebesar Rp420.000,00.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS dari setoran SSBP nomor 499122CPTAOR7HBC tanggal 7 Agustus 2025 sebesar Rp560.000,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 433 tanggal 21 Agustus 2025, SP2D nomor 259991330158086 tanggal 21 Agustus 2025 sebesar Rp1.100.000,00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus PNS (512411)
- Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK dari setoran SSBP nomor F58F32CPTEN7PR06 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp180.572,00.

Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK (511611)
- Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK dari setoran SSBP nomor 23C501GCDDCNONKP tanggal 6 Mei 2025 sebesar Rp3.203.600,00.

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK (511619)
- Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK dari setoran SSBP nomor 23C501GCDDCNONKP tanggal 6 Mei 2025 sebesar Rp67,00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (511624)
- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK dari setoran SSBP nomor 23C5016CDDCNONKP tanggal 6 Mei 2025 sebesar Rp540.000,00.

Belanja Barang Rp10.632.274.024, 00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK (511625)
- Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK dari setoran SSBP nomor 23C501GCDDCNONKP tanggal 6 Mei 2025 sebesar Rp72.420,00.

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rp10.632.274.024,00 dan Rp45.145.930.992,00 Realisasi belanja barang Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar 97,36%.

Pengembalian Belanja Barang

Pengembalian Belanja Barang Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp10.674.090,00 dari belanja Pegawai sebesar Rp10.632.274.024,00 dengan Rincian Pengembalian belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp265.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 8CA5C1GCDEC19QIJ tanggal 11 Juni 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp190.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 374EE1GCDI8ASOJD tanggal 28 Oktober 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp10.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 373020JUTOH2G0SO tanggal 20 November 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp1.850.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : BCF0245KT3JBPI9U tanggal 2 Desember 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp420.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : CE09A397D91S15N7 tanggal 8 Desember 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp420.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perjalanan Biasa nomor NTPN : A71B08JOC8G6F5N3 tanggal 8 Desember 2025.

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp420.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 2B5705UFSOP185N0 tanggal 8 Desember 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp420.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 9CBBC45KT3N7RUHQ tanggal 15 Desember 2025.

Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp760.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : F0A7745KSQA60MMD tanggal 5 Februari 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp345.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : C8C987NAS4JNKMNJ tanggal 5 Februari 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp345.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 0CE160JUTG0KCMN7 tanggal 5 Februari 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp265.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 5F6A745KSQAFI1A7 tanggal 7 Februari 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp530.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 10B080JUTG0TU19R tanggal 10 Februari 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp170.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 2D5971GCDEDH09IU tanggal 16 Juni 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp265.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 57BAD5UFSJ9F19L2 tanggal 16 Juni 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp95.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 77140522CON2K9LU tanggal 16 Juni 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp265.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : ED3390JUTJR4J9LJ tanggal 16 Juni 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp170.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 150F80JUTKQE4E12 tanggal 21 Juli 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp170.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : E60082CPT9V6UE0O tanggal 21 Juli 2025.

Pengembalian Belanja Bahan (521211)

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp900.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 871BC7NASD45O0NC tanggal 20 November 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp900.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perjalanan Biasa nomor NTPN : 4F91A0JUTPA3N5K8 tanggal 3 Desember 2025.

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp48.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 63FB7397D95EI41F 2677F2CPTEL4V9DG tanggal 17 Desember 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp50.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 2677F2CPTEL4V9DG tanggal 24 Desember 2025.

Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran (521111)

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp21.090,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : AEA2245KT2N1K3JQ tanggal 7 November 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp5.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 0AF4445KT2QK40RK tanggal 20 November 2025.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp0,00.

Realisasi Belanja Modal Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.707.607.175,00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
		BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.	0.	0.	2,707,707,175.	100,000.	2,707,607,175.
JUMLAH		0.	0.	0.	2,707,707,175.	100,000.	2,707,607,175.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran/TUP

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00,-

Hasil Pemeriksaan Kas tanggal 31 Desember 2025, Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran dengan nomer Rekening 9890446220981000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp0,00 sehingga Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp,00.,

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas berada dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP melainkan dari LS.

C.3 Piutang PNBP

Piutang PNBP Rp0,00,-

Saldo Piutang PNBP Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan telah diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang lainnya disajikan sebagai berikut:

C.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang TdakTertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.Penyisihan piutang tidak tertagih - piutang Buka Pajak merupakan 5/1000 dikalikan Piutang lainnya dari Pengembalian Belanja Pegawai.

C.5. Persediaan

Persediaan Rp34,390,710,00

Nilai Persediaan Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp34.390.710,00 dan Rp91.253.504,00, Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34.390.710,00.

C.6. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp21,595,385,277,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21,595,385,277,00 dan Rp21,614,225,277,00 .

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp0,00,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00, dan Rp0,00

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp17,647,998,383.00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp17,647,998,383,00) dan (Rp15.522.406.986,00) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.9. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp596.070.800.00.

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp596.070.800,00 dan Rp596.070.800,00 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa 1 unit Aplikasi Audit Manajemen Sistem (AMS) dengan nilai Rp 596.070.800,00 dari Pusdatin sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor B.504/SJ.7/PL.450/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Aset Lain-Lain Rp0.00,-

C.10. Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-Lain Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.896.711.324,00. Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahannya dalam sudah di hapuskan.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (*Rp596,070,800.00*)

C.11. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp596,070,800,00) dan (Rp2.490.438.824,00).

C.12. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,00

Saldo Uang Muka dari KPPN Periode Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0,00.

C.13. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp13,085,494,00. Terdapat Utang Kepada Pihak ketiga Periode 31 Desember 2024 berupa Belanja Pegawai yang belum dibayarkan yang terdiri dari dari Kekurangan selisih Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Muda ke Auditor Madya untuk Bulan November dan Desember serta Pengaaktifkan Kembali Pegawai setelah melaksanakan Tugas Belajar.

Utang yang belum ditagihkan Rp0,00

C.14. Utang yang belum ditagihkan

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Periode Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.15 Ekuitas

Ekuitas Rp3,981,777,604,00,-

Ekuitas Periode Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3,981,777,604,00 dan Rp6,172,329,601,00 Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp.0.00

Jumlah Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00..

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp38,939,836,883,00

Jumlah Beban Pegawai Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp38,939,836,883,00 dan Rp36,587,189,221,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pegawai di Inspektorat Jenderal periode sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah 209 Orang dengan 550 Jiwa sedangkan Pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berjumlah 3 Orang dengan 7 Jiwa.

D.3 Beban Persediaan

beban Persediaan Rp93,458,747,00.

Jumlah Beban Persediaan Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp93,458,747,00 dan Rp273,243,522,00 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp3,548,919,778,00.

Beban Barang dan Jasa Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3,548,919,778,00 dan Rp7,259,223,722,00 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang danl/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp639,786,947,00

Beban pemeliharaan Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp639,786,947,00 dan Rp1.168,104,336,00. Beban Pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Pemeliharaan Aquarium , Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan roda 4 yang berjumlah 13 Unit yang ada di lingkup Inspektorat Jenderal berupa biaya BBM, Service dan Perbaikan kendaraan serta Pajak Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook, Printer dan Pemeliharaan Kendaraan roda 2 di lingkup Inspektorat Jenderal yang berjumlah 6 Unit. Sedangkan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pembongkaran Partisi Ruang Kerja Humas dan Tindak Lanjut, Simtem Informasi Pelaporan di lantai 2 Gedung mina Bahari 3 dan Merenovasi Mushola dilantai 4 Gedung Mina Bahari 3 menjadi Ruang kerja Humas dan Tindak Lanjut..

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp6,406,971,346,00.

Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6,406,971,346,00 dan Rp36,457,547,036,00 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp2,135,011,397,00,-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,135,011,397,00, dan Rp2,290,101,538,00, beban tersebut merupakan nilai dari Penyusutan dan Amortisasi Tahun berjalan. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset Tak Terwujud.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Beban Penyisihan Piutang tidak tertagih Rp0,00,-

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Putang Tidak Tertagih Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih merupakan 5/1000 dari Piutang lainnya.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp68,331,634,00,-

D.9 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional periode yang berakhir pada Periode 31 Desember 2025 senilai Rp68,331,634,00 dan 2024 senilai Rp0,00.

Pos Pos Luar Biasa Rp.0

D.10 Pos-Pos Luar Biasa

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp6,172,329,601,00.

Nilai ekuitas awal pada periode yang berakhir Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6,172,329,601,00 dan Rp5.762.264.041,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO (Rp51,695,653,464,00)

Jumlah Defisit LO untuk Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah defisit sebesar (Rp51,695,653,464,00) dan (Rp84,035,409,375,00) Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0,00.

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4 Koreksi lain-lain

Koreksi Lain-Lain Rp0,00

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi dari jurnal Beban Penyisihan Piutang tahun lalu. Koreksi Lain-Lain untuk Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp119,391,00.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp49,505,101,467,00.

Nilai ekuitas pada tanggal Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp49,505,101,467,00 dan Rp84,445,355,544,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Rp2,190,551,997,00.)

Nilai ekuitas pada tanggal Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar (Rp2,190,551,997,00) dan Rp410,065,560,00.

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Rp3,981,777,604,00.

Nilai ekuitas pada tanggal Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp3,981,777,604,00 dan Rp6,172,329,601,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Rekening Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:252/PMK.05/2016 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/SatuanKerja. Sesuai surat persetujuan KPPN Jakarta VI tanggal 16 April 2016 Nomor: S-1510/WPB.12/KP.175/2016, Inspektorat Jenderal telah melakukan pembukaan rekening pengeluaran pada Bank BNI Cabang Utama Gambir Jakarta Pusat dengan nomor rekening 243607916 (BPg 175.Inspektorat Jenderal KKP) untuk menampung uang keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

I. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP

1. Data Umum Satker

a. Nama Satker : Inspektorat Jenderal
b. Kode Satker : 032.02.0199.622098.000.KP
c. Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 2,3,4 Jakarta Pusat 10110
d. Telepon/Fax : (021) 3520336, Fax (021) 3513206

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

e. Kepala Satker : Ade Tajudin Sutiawarwan.
f. Kuasa Pengguna Anggaran : Lina Herlina.
g. Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat : Mochamad Firdaus.
h. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat I : Thoyib Wisnu Aji.
i. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat II : Rianawati.
j. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat III : Teguh Erawan.
k. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat IV : Dian Dwi Putri.
l. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat V : Tri Murwati, S.Pi.

Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2022 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen KKP memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern lingkup KKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Itjen KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai PermenKP tersebut, struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP terdiri atas enam unit kerja Eselon II, yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi lingkup Inspektorat Jenderal KKP.

b. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Sekretariat Jenderal KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut dan serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut.

c. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

d. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

e. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Direktorat Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendaliaan dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

f. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Inspektorat Jenderal, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

II. Pejabat Pengelola Anggaran Inspektorat Jenderal KKP

Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Jenderal KKP melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Pejabat Pengelola Anggaran, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.33/PA/2025 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat di Lingkungan KKP tanggal 30 September 2025.
2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal Nomor 03/ITJ/KPA/I/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal.
3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal Nomor 255/ITJ/KPA/II/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal.
4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

05/ITJ/KPA/I/2025 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran tanggal 03 Januari 2025.

5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal Nomor 04/ITJ/KPA/I/2025 Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal tanggal 03 Januari 2025.

III. Transfer Keluar

Inspektorat Jenderal melakukan Transfer Keluar ke Direktorat Jenderal PDSPKP dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara nomor T.1022/ITJ.0/PL.510/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 dengan aset berupa Personal Komputer Lainnya sebanyak 1 unit merk Samsung/Galaxy S9+ 5G dengan Nilai Perolehan sebesar Rp18.840.000,00 dengan Nilai Buku sebesar Rp9.420.000,00.

IV. Sisa Anggaran Pada Inspektorat Jenderal TA 2025

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp70.674.934,00. Realisasi Belanja Negara Semester II Tahun 2025 adalah sebesar Rp49.585.196.401,00. atau mencapai 98,87 persen terhadap alokasi anggaran sebesar Rp50.150.274.000,00. Sehingga terjadi sisa anggaran sebesar Rp565.077.599,00 yang meliputi antara lain:

a. Terdapat 5 orang pegawai mutasi ke KL lain dan 2 orang pegawai pensiun pada bulan Oktober sd Desember 2025 sehingga belanja pegawai tidak terealisasi senilai Rp276.547.623.
b. Belanja barang senilai Rp288.527.976 terdiri dari :
   1) Perjalanan dinas dilingkup Inspektorat senilai Rp17.509.035.
   2) Operasional Kantor dan Pemeliharaan BMN senilai Rp7.861.554.
   3) Perjalanan dinas yang dibatalkan pada bulan Desember senilai Rp188.187.715.
   4) Perjalanan dinas luar kota/dalam kota dan konsumsi rapat kegiatan Kesekretariatan (Terpadu) senilai Rp74.969.672.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 11:56 AM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	38,939,836,883	36,587,189,221	2,352,647,662	6.43
Beban Persediaan	93,458,747	273,243,522	(179,784,775)	(65.797)
Beban Barang dan Jasa	3,548,919,778	7,259,223,722	(3,710,303,944)	(51.112)
Beban Pemeliharaan	639,786,947	1,168,104,336	(528,317,389)	(45.229)
Beban Perjalanan Dinas	6,406,971,346	36,457,547,036	(30,050,575,690)	(82.426)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 11:56 AM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,135,011,397	2,290,101,538	(155,090,141)	(6.772)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	51,763,985,098	84,035,409,375	(32,271,424,277)	(38.402)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(51,763,985,098)	(84,035,409,375)	32,271,424,277	(38.402)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	63,301,840	0	63,301,840	
Pendapatan Pelepasan Aset	65,645,140	0	65,645,140	
Beban Pelepasan Aset	2,343,300	0	2,343,300	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5,029,794	0	5,029,794	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5,029,794	0	5,029,794	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	68,331,634	0	68,331,634	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(51,695,653,464)	(84,035,409,375)	32,339,755,911	(38.483)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(51,695,653,464)	(84,035,409,375)	32,339,755,911	(38.483)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

ADE TAJUDIN SUTIAWARMAN
NIP 196801031990031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:03 PM

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,172,329,601	5,762,264,041	410,065,560	7.12
SURPLUS/DEFISIT-LO	(51,695,653,464)	(84,035,409,375)	32,339,755,911	(38.48)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	119,391	(119,391)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	119,391	(119,391)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	49,505,101,467	84,445,355,544	(34,940,254,077)	(41.38)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,190,551,997)	410,065,560	(2,600,617,557)	(634.2)
EKUITAS AKHIR	3,981,777,604	6,172,329,601	(2,190,551,997)	(35.49)

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

ADE TAJUDIN SUTIAWARMAN

NIP 196801031990031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : INSPEKTORAT JENDERAL 02
SATUAN KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL 622098

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 12:06 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**70,674,934**	**70,674,934**	**0**	**0**	**23,878,250**	**(23,878,250)**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	70,674,934	70,674,934	0	0	23,878,250	(23,878,250)	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**70,674,934**	**70,674,934**	**0**	**0**	**23,878,250**	**(23,878,250)**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	50,150,274,000	49,585,196,401	(565,077,599)	99	86,789,911,000	84,427,641,894	2,362,269,106	97
1. Belanja Pegawai	39,229,470,000	38,952,922,377	(276,547,623)	99	36,583,468,000	36,574,103,727	9,364,273	100
2. Belanja Barang	10,920,802,000	10,632,274,024	(288,527,976)	97	47,498,733,000	45,145,930,992	2,352,802,008	95
3. Belanja Modal	2,000	0	(2,000)	0	2,707,710,000	2,707,607,175	102,825	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : INSPEKTORAT JENDERAL 02
SATUAN KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL 622098

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 12:06 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**50,150,274,000**	**49,585,196,401**	**(565,077,599)**	**99**	**86,789,911,000**	**84,427,641,894**	**2,362,269,106**	**97**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

ADE TAJUDIN SUTIAWARMAN
NIP 196801031990031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 02**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 622098**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 1:11 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,461,392,000	11,384,058,000	11,383,781,840	0	11,383,781,840	100	276,160
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	145,000	150,000	137,660	1,299	136,361	90.91	13,639
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	748,091,000	840,611,000	839,740,330	0	839,740,330	99.9	870,670
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	223,471,000	248,319,000	247,911,250	0	247,911,250	99.84	407,750
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	391,150,000	356,810,000	356,810,000	2,690,000	354,120,000	99.25	2,690,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,468,670,000	1,816,099,000	1,816,074,000	3,533,000	1,812,541,000	99.8	3,558,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	72,234,000	180,717,000	177,224,458	0	177,224,458	98.07	3,492,542
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	574,859,000	569,605,000	569,583,300	0	569,583,300	100	21,700
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,021,000,000	1,514,085,000	1,410,639,105	0	1,410,639,105	93.17	103,445,895
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	129,585,000	64,705,000	64,630,000	3,525,000	61,105,000	94.44	3,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	16,090,597,000	16,975,159,000	16,866,531,943	9,749,299	16,856,782,644	99.3	118,376,356
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	150,000,000	284,007,000	283,804,500	3,203,600	280,600,900	98.8	3,406,100
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	7,000	5,823	115	5,708	81.54	1,292
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	15,000,000	21,800,000	21,494,890	0	21,494,890	98.6	305,110
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,000,000	5,400,000	5,362,894	0	5,362,894	99.31	37,106
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	20,000,000	24,500,000	23,050,000	540,000	22,510,000	91.88	1,990,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,000,000	19,500,000	19,263,720	72,420	19,191,300	98.42	308,700
511628	Belanja Uang Makan PPPK	40,000,000	54,600,000	50,841,683	0	50,841,683	93.12	3,758,317
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	7,655,000	7,650,000	0	7,650,000	99.93	5,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	235,006,000	417,469,000	411,473,510	3,816,135	407,657,375	97.65	9,811,625
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	40,600,000	20,000,000	11,154,000	0	11,154,000	55.77	8,846,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	10,000,000	3,000,000	979,000	0	979,000	32.63	2,021,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	50,600,000	23,000,000	12,133,000	0	12,133,000	52.75	10,867,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	22,035,767,000	21,451,242,000	21,321,231,766	180,572	21,321,051,194	99.39	130,190,806
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	600,000,000	362,600,000	355,298,164	0	355,298,164	97.99	7,301,836
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	22,635,767,000	21,813,842,000	21,676,529,930	180,572	21,676,349,358	99.37	137,492,642
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	39,011,970,000	39,229,470,000	38,966,668,383	13,746,006	38,952,922,377	99.3	276,547,623
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 02**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 622098**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 1:11 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	662,410,000	389,088,000	381,550,307	26,090	381,524,217	98.06	7,563,783
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,400,000	403,000	402,100	0	402,100	99.78	900
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	319,170,000	281,425,000	281,421,000	0	281,421,000	100	4,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,282,036,000	786,437,000	786,436,701	0	786,436,701	100	299
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,269,016,000	1,457,353,000	1,449,810,108	26,090	1,449,784,018	99.48	7,568,982
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,537,345,000	1,035,974,000	993,483,790	2,478,000	991,005,790	95.66	44,968,210
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	13,500,000	0	0	0	0		0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,504,500,000	31,902,000	31,901,532	0	31,901,532	100	468
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,055,345,000	1,067,876,000	1,025,385,322	2,478,000	1,022,907,322	95.79	44,968,678
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	242,420,000	36,596,000	36,595,953	0	36,595,953	100	47
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	242,420,000	36,596,000	36,595,953	0	36,595,953	100	47
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	4,800,000	1,960,000	1,852,042	0	1,852,042	94.49	107,958
522141	Belanja Sewa	77,400,000	136,450,000	133,750,000	0	133,750,000	98.02	2,700,000
522151	Belanja Jasa Profesi	578,100,000	50,280,000	36,895,000	0	36,895,000	73.38	13,385,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,478,056,000	903,985,000	903,731,396	0	903,731,396	99.97	253,604
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,138,356,000	1,092,675,000	1,076,228,438	0	1,076,228,438	98.49	16,446,562
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182,052,000	18,499,000	18,499,000	0	18,499,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	828,925,000	621,300,000	621,287,947	0	621,287,947	100	12,053
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,010,977,000	639,799,000	639,786,947	0	639,786,947	100	12,053
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,522,705,000	5,882,221,000	5,689,447,716	3,995,000	5,685,452,716	96.65	196,768,284
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,828,520,000	685,117,000	666,533,630	4,175,000	662,358,630	96.68	22,758,370
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,969,400,000	59,165,000	59,160,000	0	59,160,000	99.99	5,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,643,960,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	29,964,585,000	6,626,503,000	6,415,141,346	8,170,000	6,406,971,346	96.69	219,531,654
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	39,680,699,000	10,920,802,000	10,642,948,114	10,674,090	10,632,274,024	97.36	288,527,976
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,220,500,000	2,000	0	0	0	0	2,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 02**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 622098**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 1:11 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	3,220,500,000	2,000	0	0	0	0	2,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	3,220,500,000	2,000	0	0	0	0	2,000
	JUMLAH BELANJA	81,913,169,000	50,150,274,000	49,609,616,497	24,420,096	49,585,196,401	98.87	565,077,599

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 02**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 622098**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 11:57 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,461,392,000	11,384,058,000	11,383,781,840	0	11,383,781,840	100	276,160
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	145,000	150,000	137,660	1,299	136,361	90.91	13,639
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	748,091,000	840,611,000	839,740,330	0	839,740,330	99.9	870,670
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	223,471,000	248,319,000	247,911,250	0	247,911,250	99.84	407,750
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	391,150,000	356,810,000	356,810,000	2,690,000	354,120,000	99.25	2,690,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,468,670,000	1,816,099,000	1,816,074,000	3,533,000	1,812,541,000	99.8	3,558,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	72,234,000	180,717,000	177,224,458	0	177,224,458	98.07	3,492,542
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	574,859,000	569,605,000	569,583,300	0	569,583,300	100	21,700
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,021,000,000	1,514,085,000	1,410,639,105	0	1,410,639,105	93.17	103,445,895
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	129,585,000	64,705,000	64,630,000	3,525,000	61,105,000	94.44	3,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	16,090,597,000	16,975,159,000	16,866,531,943	9,749,299	16,856,782,644	99.3	118,376,356
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	150,000,000	284,007,000	283,804,500	3,203,600	280,600,900	98.8	3,406,100
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	7,000	5,823	115	5,708	81.54	1,292
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	15,000,000	21,800,000	21,494,890	0	21,494,890	98.6	305,110
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,000,000	5,400,000	5,362,894	0	5,362,894	99.31	37,106
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	20,000,000	24,500,000	23,050,000	540,000	22,510,000	91.88	1,990,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,000,000	19,500,000	19,263,720	72,420	19,191,300	98.42	308,700
511628	Belanja Uang Makan PPPK	40,000,000	54,600,000	50,841,683	0	50,841,683	93.12	3,758,317
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	7,655,000	7,650,000	0	7,650,000	99.93	5,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	235,006,000	417,469,000	411,473,510	3,816,135	407,657,375	97.65	9,811,625
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	40,600,000	20,000,000	11,154,000	0	11,154,000	55.77	8,846,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	10,000,000	3,000,000	979,000	0	979,000	32.63	2,021,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	50,600,000	23,000,000	12,133,000	0	12,133,000	52.75	10,867,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	22,035,767,000	21,451,242,000	21,321,231,766	180,572	21,321,051,194	99.39	130,190,806
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	600,000,000	362,600,000	355,298,164	0	355,298,164	97.99	7,301,836
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	22,635,767,000	21,813,842,000	21,676,529,930	180,572	21,676,349,358	99.37	137,492,642
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	39,011,970,000	39,229,470,000	38,966,668,383	13,746,006	38,952,922,377	99.3	276,547,623
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 02**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 622098**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 11:57 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	662,410,000	389,088,000	381,550,307	26,090	381,524,217	98.06	7,563,783
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,400,000	403,000	402,100	0	402,100	99.78	900
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	319,170,000	281,425,000	281,421,000	0	281,421,000	100	4,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,282,036,000	786,437,000	786,436,701	0	786,436,701	100	299
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,269,016,000	1,457,353,000	1,449,810,108	26,090	1,449,784,018	99.48	7,568,982
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,537,345,000	1,035,974,000	993,483,790	2,478,000	991,005,790	95.66	44,968,210
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	13,500,000	0	0	0	0		0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,504,500,000	31,902,000	31,901,532	0	31,901,532	100	468
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,055,345,000	1,067,876,000	1,025,385,322	2,478,000	1,022,907,322	95.79	44,968,678
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	242,420,000	36,596,000	36,595,953	0	36,595,953	100	47
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	242,420,000	36,596,000	36,595,953	0	36,595,953	100	47
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	4,800,000	1,960,000	1,852,042	0	1,852,042	94.49	107,958
522141	Belanja Sewa	77,400,000	136,450,000	133,750,000	0	133,750,000	98.02	2,700,000
522151	Belanja Jasa Profesi	578,100,000	50,280,000	36,895,000	0	36,895,000	73.38	13,385,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,478,056,000	903,985,000	903,731,396	0	903,731,396	99.97	253,604
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,138,356,000	1,092,675,000	1,076,228,438	0	1,076,228,438	98.49	16,446,562
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182,052,000	18,499,000	18,499,000	0	18,499,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	828,925,000	621,300,000	621,287,947	0	621,287,947	100	12,053
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,010,977,000	639,799,000	639,786,947	0	639,786,947	100	12,053
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,522,705,000	5,882,221,000	5,689,447,716	3,995,000	5,685,452,716	96.65	196,768,284
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,828,520,000	685,117,000	666,533,630	4,175,000	662,358,630	96.68	22,758,370
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,969,400,000	59,165,000	59,160,000	0	59,160,000	99.99	5,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,643,960,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	29,964,585,000	6,626,503,000	6,415,141,346	8,170,000	6,406,971,346	96.69	219,531,654
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	39,680,699,000	10,920,802,000	10,642,948,114	10,674,090	10,632,274,024	97.36	288,527,976
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,220,500,000	2,000	0	0	0	0	2,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 02**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 622098**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 11:57 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	3,220,500,000	2,000	0	0	0	0	2,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	3,220,500,000	2,000	0	0	0	0	2,000
	JUMLAH BELANJA	81,913,169,000	50,150,274,000	49,609,616,497	24,420,096	49,585,196,401	98.87	565,077,599

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 02**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 622098**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 11:57 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,461,392,000	11,384,058,000	11,383,781,840	0	11,383,781,840	100	276,160
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	145,000	150,000	137,660	1,299	136,361	90.91	13,639
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	748,091,000	840,611,000	839,740,330	0	839,740,330	99.9	870,670
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	223,471,000	248,319,000	247,911,250	0	247,911,250	99.84	407,750
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	391,150,000	356,810,000	356,810,000	2,690,000	354,120,000	99.25	2,690,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,468,670,000	1,816,099,000	1,816,074,000	3,533,000	1,812,541,000	99.8	3,558,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	72,234,000	180,717,000	177,224,458	0	177,224,458	98.07	3,492,542
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	574,859,000	569,605,000	569,583,300	0	569,583,300	100	21,700
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,021,000,000	1,514,085,000	1,410,639,105	0	1,410,639,105	93.17	103,445,895
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	129,585,000	64,705,000	64,630,000	3,525,000	61,105,000	94.44	3,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	16,090,597,000	16,975,159,000	16,866,531,943	9,749,299	16,856,782,644	99.3	118,376,356
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	150,000,000	284,007,000	283,804,500	3,203,600	280,600,900	98.8	3,406,100
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	7,000	5,823	115	5,708	81.54	1,292
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	15,000,000	21,800,000	21,494,890	0	21,494,890	98.6	305,110
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,000,000	5,400,000	5,362,894	0	5,362,894	99.31	37,106
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	20,000,000	24,500,000	23,050,000	540,000	22,510,000	91.88	1,990,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,000,000	19,500,000	19,263,720	72,420	19,191,300	98.42	308,700
511628	Belanja Uang Makan PPPK	40,000,000	54,600,000	50,841,683	0	50,841,683	93.12	3,758,317
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	7,655,000	7,650,000	0	7,650,000	99.93	5,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	235,006,000	417,469,000	411,473,510	3,816,135	407,657,375	97.65	9,811,625
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	40,600,000	20,000,000	11,154,000	0	11,154,000	55.77	8,846,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	10,000,000	3,000,000	979,000	0	979,000	32.63	2,021,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	50,600,000	23,000,000	12,133,000	0	12,133,000	52.75	10,867,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	22,035,767,000	21,451,242,000	21,321,231,766	180,572	21,321,051,194	99.39	130,190,806
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	600,000,000	362,600,000	355,298,164	0	355,298,164	97.99	7,301,836
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	22,635,767,000	21,813,842,000	21,676,529,930	180,572	21,676,349,358	99.37	137,492,642
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	39,011,970,000	39,229,470,000	38,966,668,383	13,746,006	38,952,922,377	99.3	276,547,623
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 02**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 622098**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 11:57 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	662,410,000	389,088,000	381,550,307	26,090	381,524,217	98.06	7,563,783
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,400,000	403,000	402,100	0	402,100	99.78	900
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	319,170,000	281,425,000	281,421,000	0	281,421,000	100	4,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,282,036,000	786,437,000	786,436,701	0	786,436,701	100	299
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,269,016,000	1,457,353,000	1,449,810,108	26,090	1,449,784,018	99.48	7,568,982
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,537,345,000	1,035,974,000	993,483,790	2,478,000	991,005,790	95.66	44,968,210
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	13,500,000	0	0	0	0		0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,504,500,000	31,902,000	31,901,532	0	31,901,532	100	468
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,055,345,000	1,067,876,000	1,025,385,322	2,478,000	1,022,907,322	95.79	44,968,678
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	242,420,000	36,596,000	36,595,953	0	36,595,953	100	47
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	242,420,000	36,596,000	36,595,953	0	36,595,953	100	47
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	4,800,000	1,960,000	1,852,042	0	1,852,042	94.49	107,958
522141	Belanja Sewa	77,400,000	136,450,000	133,750,000	0	133,750,000	98.02	2,700,000
522151	Belanja Jasa Profesi	578,100,000	50,280,000	36,895,000	0	36,895,000	73.38	13,385,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,478,056,000	903,985,000	903,731,396	0	903,731,396	99.97	253,604
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,138,356,000	1,092,675,000	1,076,228,438	0	1,076,228,438	98.49	16,446,562
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182,052,000	18,499,000	18,499,000	0	18,499,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	828,925,000	621,300,000	621,287,947	0	621,287,947	100	12,053
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,010,977,000	639,799,000	639,786,947	0	639,786,947	100	12,053
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,522,705,000	5,882,221,000	5,689,447,716	3,995,000	5,685,452,716	96.65	196,768,284
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,828,520,000	685,117,000	666,533,630	4,175,000	662,358,630	96.68	22,758,370
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,969,400,000	59,165,000	59,160,000	0	59,160,000	99.99	5,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,643,960,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	29,964,585,000	6,626,503,000	6,415,141,346	8,170,000	6,406,971,346	96.69	219,531,654
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	39,680,699,000	10,920,802,000	10,642,948,114	10,674,090	10,632,274,024	97.36	288,527,976
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,220,500,000	2,000	0	0	0	0	2,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 02**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 622098**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 11:57 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	3,220,500,000	2,000	0	0	0	0	2,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	3,220,500,000	2,000	0	0	0	0	2,000
	JUMLAH BELANJA	81,913,169,000	50,150,274,000	49,609,616,497	24,420,096	49,585,196,401	98.87	565,077,599

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 02**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 622098**	**INSPEKTORAT JENDERAL**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 05/05/26 1:12 PM

Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,645,140	0	65,645,140	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	65,645,140	0	65,645,140	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,029,794	0	5,029,794	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	5,029,794	0	5,029,794	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	70,674,934	0	70,674,934	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	70,674,934	0	70,674,934	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 02**	**INSPEKTORAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 622098**	**INSPEKTORAT JENDERAL**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 05/05/26 1:12 PM

Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,645,140	0	65,645,140	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	65,645,140	0	65,645,140	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,029,794	0	5,029,794	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	5,029,794	0	5,029,794	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	70,674,934	0	70,674,934	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	70,674,934	0	70,674,934	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:06 PM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	34,390,710	91,253,504	(56,862,794)	(62.31)
JUMLAH ASET LANCAR	**34,390,710**	**91,253,504**	**(56,862,794)**	**(62.31)**
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	21,504,991,754	21,614,225,277	(109,233,523)	(0.51)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(17,557,604,860)	(15,522,406,986)	(2,035,197,874)	13.11
JUMLAH ASET TETAP	**3,947,386,894**	**6,091,818,291**	**(2,144,431,397)**	**(35.20)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	596,070,800	596,070,800	0	0.00
Aset Lain-lain	90,393,523	1,896,711,324	(1,806,317,801)	(95.23)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(686,464,323)	(2,490,438,824)	1,803,974,501	(72.44)
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**2,343,300**	**(2,343,300)**	**(100.00)**
JUMLAH ASET	**3,981,777,604**	**6,185,415,095**	**(2,203,637,491)**	**(35.63)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	13,085,494	(13,085,494)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**0**	**13,085,494**	**(13,085,494)**	**(100.00)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**0**	**13,085,494**	**(13,085,494)**	**(100.00)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,981,777,604	6,172,329,601	(2,190,551,997)	(35.49)
JUMLAH EKUITAS	**3,981,777,604**	**6,172,329,601**	**(2,190,551,997)**	**(35.49)**
JUMLAH EKUITAS	**3,981,777,604**	**6,172,329,601**	**(2,190,551,997)**	**(35.49)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3,981,777,604**	**6,185,415,095**	**(2,203,637,491)**	**(35.63)**

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

ADE TAJUDIN SUTIAWARMAN

NIP 196801031990031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:06 PM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	34,390,710	91,253,504	(56,862,794)	(62.31)
JUMLAH ASET LANCAR	**34,390,710**	**91,253,504**	**(56,862,794)**	**(62.31)**
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	21,504,991,754	21,614,225,277	(109,233,523)	(0.51)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(17,557,604,860)	(15,522,406,986)	(2,035,197,874)	13.11
JUMLAH ASET TETAP	**3,947,386,894**	**6,091,818,291**	**(2,144,431,397)**	**(35.20)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	596,070,800	596,070,800	0	0.00
Aset Lain-lain	90,393,523	1,896,711,324	(1,806,317,801)	(95.23)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(686,464,323)	(2,490,438,824)	1,803,974,501	(72.44)
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**2,343,300**	**(2,343,300)**	**(100.00)**
JUMLAH ASET	**3,981,777,604**	**6,185,415,095**	**(2,203,637,491)**	**(35.63)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	13,085,494	(13,085,494)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**0**	**13,085,494**	**(13,085,494)**	**(100.00)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**0**	**13,085,494**	**(13,085,494)**	**(100.00)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,981,777,604	6,172,329,601	(2,190,551,997)	(35.49)
JUMLAH EKUITAS	**3,981,777,604**	**6,172,329,601**	**(2,190,551,997)**	**(35.49)**
JUMLAH EKUITAS	**3,981,777,604**	**6,172,329,601**	**(2,190,551,997)**	**(35.49)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3,981,777,604**	**6,185,415,095**	**(2,203,637,491)**	**(35.63)**

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

ADE TAJUDIN SUTIAWARMAN

NIP 196801031990031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:07 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	34,390,710	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	21,504,991,754	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	17,557,604,860
0.0	162151	Software	596,070,800	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	90,393,523	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	90,393,523
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	596,070,800
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	49,585,196,401
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	70,674,934	0
0.0	313211	Transfer Keluar	9,420,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	6,172,329,601
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,645,140
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,029,794
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	11,377,651,346	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	136,361	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	839,740,330	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	247,911,250	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	354,120,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,805,586,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	177,224,458	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	569,583,300	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,410,639,105	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	61,105,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	280,600,900	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,708	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	21,494,890	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	5,362,894	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	22,510,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	19,191,300	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	50,841,683	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	7,650,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	11,154,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	979,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	21,321,051,194	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	355,298,164	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	381,524,217	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	402,100	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	281,421,000	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:07 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	786,436,701	0
3.0	521211	Beban Bahan	991,005,790	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	31,901,532	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,852,042	0
3.0	522141	Beban Sewa	133,750,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	36,895,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	903,731,396	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,499,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	621,287,947	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5,685,452,716	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	662,358,630	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	59,160,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,135,011,397	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	93,458,747	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	2,343,300	0
JUMLAH			**74,072,270,119**	**74,072,270,119**

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

ADE TAJUDIN SUTIAWARMAN

NIP 196801031990031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:07 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	34,390,710	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	21,504,991,754	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	17,557,604,860
0.0	162151	Software	596,070,800	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	90,393,523	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	90,393,523
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	596,070,800
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	49,585,196,401
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	70,674,934	0
0.0	313211	Transfer Keluar	9,420,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	6,172,329,601
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,645,140
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,029,794
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	11,377,651,346	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	136,361	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	839,740,330	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	247,911,250	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	354,120,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,805,586,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	177,224,458	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	569,583,300	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,410,639,105	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	61,105,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	280,600,900	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,708	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	21,494,890	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	5,362,894	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	22,510,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	19,191,300	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	50,841,683	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	7,650,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	11,154,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	979,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	21,321,051,194	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	355,298,164	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	381,524,217	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	402,100	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	281,421,000	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:07 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	786,436,701	0
3.0	521211	Beban Bahan	991,005,790	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	31,901,532	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,852,042	0
3.0	522141	Beban Sewa	133,750,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	36,895,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	903,731,396	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,499,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	621,287,947	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5,685,452,716	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	662,358,630	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	59,160,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,135,011,397	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	93,458,747	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	2,343,300	0
JUMLAH			**74,072,270,119**	**74,072,270,119**

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

ADE TAJUDIN SUTIAWARMAN

NIP 196801031990031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:08 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	49,585,196,401
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	70,674,934	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,645,140
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,029,794
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,383,781,840	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	137,660	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	839,740,330	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	247,911,250	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	356,810,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,816,074,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	177,224,458	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	569,583,300	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,410,639,105	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	64,630,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	283,804,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,823	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	21,494,890	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,362,894	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	23,050,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	19,263,720	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	50,841,683	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,650,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	11,154,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	979,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	21,321,231,766	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	355,298,164	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	381,550,307	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	402,100	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	281,421,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	786,436,701	0
3.0	521211	Belanja Bahan	993,483,790	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	31,901,532	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	36,595,953	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,852,042	0
3.0	522141	Belanja Sewa	133,750,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	36,895,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	903,731,396	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,499,000	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:08 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	621,287,947	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,689,447,716	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	666,533,630	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	59,160,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,299
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	2,690,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	3,533,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,525,000
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	3,203,600
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	115
3.1	511624	Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	540,000
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	72,420
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	180,572
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	26,090
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	2,478,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	3,995,000
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	4,175,000
JUMLAH			**49,680,291,431**	**49,680,291,431**

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

ADE TAJUDIN SUTIAWARMAN

196801031990031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:08 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	49,585,196,401
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	70,674,934	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,645,140
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,029,794
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,383,781,840	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	137,660	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	839,740,330	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	247,911,250	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	356,810,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,816,074,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	177,224,458	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	569,583,300	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,410,639,105	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	64,630,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	283,804,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,823	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	21,494,890	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,362,894	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	23,050,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	19,263,720	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	50,841,683	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,650,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	11,154,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	979,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	21,321,231,766	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	355,298,164	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	381,550,307	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	402,100	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	281,421,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	786,436,701	0
3.0	521211	Belanja Bahan	993,483,790	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	31,901,532	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	36,595,953	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,852,042	0
3.0	522141	Belanja Sewa	133,750,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	36,895,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	903,731,396	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,499,000	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:08 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	621,287,947	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,689,447,716	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	666,533,630	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	59,160,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,299
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	2,690,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	3,533,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,525,000
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	3,203,600
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	115
3.1	511624	Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	540,000
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	72,420
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	180,572
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	26,090
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	2,478,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	3,995,000
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	4,175,000
JUMLAH			**49,680,291,431**	**49,680,291,431**

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

ADE TAJUDIN SUTIAWARMAN

196801031990031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara